

KAJIAN PERTIMBANGAN PENENTUAN LOKASI SEKOLAH (STUDI KASUS SMKN 1 GEGER KABUPATEN MADIUN)

Bambang Sigit Widodo *)

***Abstrak.** This research aims to know the description of: 1) how the consideration of determining the location and school building, and 2) how the development of school. The research approach is qualitative by case study plan. The procedure of data collection is done by : (1) in-depth interview, (2) participative observation and (3) document study. The data analysis are consisted of: (1) data reduction, (2) data display, and (3) conclusion. But, the data approval check uses credibility, transferability, dependability, and confirmability. The finding of those three location show that : (1) the consideration of determining location and building school based on the social need, and (5) the development of school which is observed from the numbers of students, school building, skills program, school achievement and partnerships between schools and external institution has increased, because the support and commitment from the district / city and community.*

***Keywords:** consideration, school location, development of school.*

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*)

sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Kebijakan dari pemerintah untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan adalah dengan memperbanyak sekolah baru, dan salah satunya adalah pembangunan SMK. Menurut Wakil Presiden RI Boediono, bahwa tujuan pemerintah memperbanyak SMK adalah agar bermanfaat bagi penciptaan tenaga kerja dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Kompas, 28 Oktober 2010). Dengan memperhatikan esensial pendidikan di sekolah kejuruan, maka setidaknya kita melihat nilai lebih

*) Bambang Sigit Widodo adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FIS Unesa

dari sekolah kejuruan dibandingkan dengan sekolah umum. Sekolah kejuruan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempersiapkan diri dengan berbagai keterampilan yang akan terpakai di dalam kehidupannya kelak, khususnya untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara pendidikan kejuruan dengan pembangunan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Salah satunya dikemukakan oleh Song Seng (2007) yang melakukan penelitian tentang hubungan pembangunan/pengembangan wilayah dengan pendidikan kejuruan di Singapura. Song Seng menyatakan bahwa pendidikan kejuruan memerankan peranan yang krusial dalam pembangunan ekonomi dan sosial dalam sebuah bangsa.

Sejalan dengan kenyataan tersebut, pemerintah pada saat ini telah membuat kebijakan untuk memperbanyak kuota SMK dibandingkan dengan SMA. Dalam renstra Ditjen Dikmen 2010-2014 dijelaskan bahwa pada akhir tahun 2004 komposisinya antara SMK dengan SMA adalah 30:70 dan pada tahun 2011 komposisinya sudah menjadi 46:54. Peningkatan 16% ini dicapai melalui

ekstensifikasi dan intensifikasi penyelenggaraan pendidikan kejuruan berbagai bentuk SMK, seperti: SMK besar di daerah industri, SMK jauh di pesantren atau sejenisnya, SMK di daerah perbatasan, SMK kecil di daerah terpencil dan pedesaan, dan sekolah menengah terpadu.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa banyak sekali lokasi sekolah yang tidak tepat karena terletak di dekat pusat-pusat keramaian seperti pasar, terminal atau pun yang terkena dampak banjir dan rawan bencana sehingga mengganggu proses pembelajaran. Selain itu banyak juga lokasi sekolah SMK yang sulit untuk dijangkau karena lokasi yang tidak didukung oleh sarana transportasi umum dan jauh dari tempat praktek kerja industri (prakerin) sebagai mitra pendidikan. Kenyataan tersebut menunjukkan masih lemahnya perencanaan pendidikan dalam menentukan lokasi sekolah. Belum adanya ketentuan pertimbangan lokasi sekolah, merupakan suatu perencanaan pendidikan yang tidak mampu untuk memprediksi atau melakukan perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal masa depan. Padahal menurut Guruge (1972: 125) *educational planning is the process*

of preparing decisions for action in the future in the field of educational development is the function of educational planning. Pentingnya perencanaan juga dikemukakan Guspika (2003:5) bahwa dalam beberapa teori ilmu manajemen umum, manajemen strategik, atau administrasi publik, apalagi dalam ilmu-ilmu spasial, menunjukkan bahwa tahap perencanaan justru merupakan proses yang sangat penting, baik sebagai alat pengendalian, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan penilaian keberhasilan pelaksanaan.

Berkaitan dengan perencanaan lokasi sekolah UNESCO telah melakukan penelitian sebagai salah satu instrumen kebijakan pada tahun 1977 yang dilakukan oleh Jaques Hallack di 14 negara berkembang di Asia, Afrika dan Eropa. Tujuan perencanaan lokasi sekolah menurut Hallack (1977: 89) adalah *purpose of the school map is part of educational planning process and a result one of essential functions to help realize the target: giving all children of school age a basic education, providing equality of educational opportunity, and making system more effective.* Dengan demikian masih menurut Hallack (1977: 89) kerangka kerja dari pemetaan sekolah adalah *it also helps to co-*

ordinate networks of schools of different levels, types of instruction and must take note of the geographical distribution of population. Dengan kata lain pemetaan sekolah membantu untuk mengkoordinasikan perbedaan level sekolah yang juga harus menyesuaikan dengan kondisi geografis dan mengkoordinasikan kebijakan dari pusat sampai di tingkat lokal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran tentang pertimbangan yang digunakan dalam menentukan lokasi dan pendirian sekolah. Hal tersebut meliputi: (a) latar belakang penentuan lokasi dan pendirian sekolah, (b) pertimbangan yang dijadikan dasar perencanaan. Selain itu juga untuk mengetahui perkembangan sekolah dengan adanya penentuan lokasi tersebut, meliputi: (a) perkembangan siswa, (b) perkembangan bangunan sekolah, (c) perkembangan program keahlian di SMK, (d) prestasi sekolah, dan (e) hubungan sekolah dengan pihak luar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan penelitian menggunakan studi multi kasus atas dasar perbedaan karakteristik obyek

yang diteliti (Yin, 1984, Bogdan and Biklen, 1982). Informan kunci dalam penelitian ini adalah mereka yang menduduki jabatan struktural pada masing-masing instansi yang disebutkan berikut ini. (1) Dinas Propinsi Jawa Timur yaitu Pengawas Dikmenjur. (2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang meliputi kepala dinas, kepala bidang dikmenjur, kepala sub bagian perencanaan, kasi sarana prasarana dikmenjur dan kasi kesiswaan dikmenjur. (3) Sekolah, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan murid. (4) Masyarakat, yaitu orang tua siswa dan komite sekolah. Menurut Miles dan Huberman (1998) bahwa sumber data manusia berfungsi sebagai informan kunci yaitu pelaku utama. Sedangkan Guba dan Lincoln (1981) mengatakan bahwa seseorang yang dijadikan informan kunci hendaknya memiliki pengetahuan dan informasi, atau dekat dengan situasi yang terjadi di fokus penelitian. Penetapan informan kunci melalui teknik bola salju (*snowball sampling*). Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam (*indept interview*), observasi partisipan (*participant obervation*), dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis

data dilakukan dengan: (1) reduksi data (2) penyajian, dan (3) kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan dalam Penentuan Lokasi dan Pendirian Sekolah

Pertimbangan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah kabupaten Madiun untuk mendirikan SMK. Harapan masyarakat secara umum adalah anak-anak mereka dapat memiliki ketrampilan setelah lulus sekolah dan dapat bekerja tanpa harus kuliah. Di lain sisi kondisi masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke SMK adalah kelompok menengah ke bawah, dengan demikian adanya SMK dapat menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan pendidikan.

Letak suatu sekolah, diharapkan dalam suatu lokasi yang baik atau optimal. Menurut Moelyarto (2008) lokasi optimal adalah lokasi yang terbaik secara ekonomis. Model yang sederhana dari teori lokasi adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara meminimkan biaya transportasi (Djojodipuro, 1992). Para ahli ekonomi mempunyai kecocokan dengan model biaya transportasi,

produk yang mempunyai biaya pengiriman tinggi, cenderung sensitif terhadap biaya transportasi. Transportasi dengan mobilitas tinggi akan mempunyai perkembangan fisik berbeda dengan jalur-jalur daerah transportasi lain, akibatnya keruangan yang timbul adalah suatu bentuk persebaran keruangan. Dalam hal ini, aksesibilitas diartikan dalam perbandingan antara waktu dan biaya (*time-cost term*) dalam hubungannya dengan sistem transportasi yang ada. Berkaitan dengan lokasi sekolah, unsur waktu (jarak) dan biaya merupakan faktor penting dalam merencanakan suatu lokasi sekolah.

Pertimbangan pemerataan pendidikan juga menjadi salah satu dasar dalam merencanakan lokasi pendirian SMK. Fakta yang ada menunjukkan bahwa sekolah yang baik cenderung berada di pusat kota, dan di daerah pinggiran kota masih belum banyak sekolah baik yang ditemukan. Untuk SMK juga masih terdapat di beberapa kecamatan saja, sehingga pemerataannya belum bisa menyebar ke seluruh kecamatan di kabupaten/kota. Berdasarkan kenyataan tersebut itulah maka di buatlah kebijakan untuk mendirikan sekolah khususnya SMK di

daerah pinggiran kota atau di setiap kecamatan yang belum ada SMA-nya. Pertimbangan ini dilakukan agar masyarakat secara umum dapat menikmati pendidikan.

Keinginan masyarakat terhadap pendirian SMK, menjadi pertimbangan yang penting dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten Madiun. Dari hasil studi kelayakan dan jaring pendapat diketahui bahwa masyarakat menghendaki adanya sekolah kejuruan di daerahnya. Atas dasar itulah maka dibuatlah perencanaan atas dasar kebutuhan masyarakat. Menurut Usman (2004) perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat disebut perencanaan dengan pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*).

Pertimbangan lain adalah untuk mengembangkan kawasan pinggiran dijadikan dasar dalam perencanaan penentuan lokasi dan pendirian SMK. Selama ini kawasan yang berkembang masih terpusat pada wilayah perkotaan atau beberapa kecamatan tertentu saja. Sedangkan di wilayah pinggiran kota atau kecamatan yang jauh dari pusat kota mengalami hambatan dalam perkembangannya. Dengan didirikannya sekolah diharapkan daerah tersebut

dapat mengalami perkembangan. Berkembangnya kawasan pinggiran atau *periphery region* dapat terjadi jika kawasan tersebut mampu memiliki daya tarik dan dapat berfungsi sebagai kawasan inti. Menurut Friedman (1979) daerah pinggiran dapat menjadi kawasan inti jika mampu mengalirkan sumber daya alam, manusia dan modal ke wilayahnya.

Walter Christaller dan August Losch (dalam Djojodipuro, 1992), secara terpisah mengembangkan teori tempat pusat (*central place theory*). Konsep utama dalam teori ini adalah apa yang dinamakan dengan *the range of good* dan *the threshold value*. *Range of good service* merupakan jarak yang ditempuh para konsumen menuju suatu tempat untuk mendapatkan pelayanan, adapun *threshold value* atau *threshold population* merupakan jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan suatu unit pelayanan sebelum dapat beroperasi secara menguntungkan. Tempat lokasi yang sentral yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tempat yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara maksimum, baik bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan, maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang atau jasa pelayanan yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditemukan bahwa pertimbangan

dalam menentukan lokasi dan pendirian SMK adalah pertimbangan ekonomi, pertimbangan pemerataan pendidikan dan pengembangan wilayah, pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap sekolah, pertimbangan komitmen pemerintah kabupaten untuk memberikan dana pendamping, pertimbangan keluaran siswa atau lulusan SMP dan pertimbangan ketersediaan lahan untuk mendirikan sekolah lebih dimungkinkan di wilayah pinggiran. Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian dikategorikan sebagai pertimbangan kebutuhan sosial.

Perkembangan Sekolah dengan Adanya Penentuan Lokasi

Perkembangan sekolah dengan adanya perencanaan penentuan lokasi akan dapat meningkatkan jumlah siswa dari tahun ke tahun. Pada awal berdirinya sekolah menerima semua siswa yang mendaftar karena kuota yang tersedia masih tersisa. Namun dalam perkembangannya jumlah pendaftar meningkat dengan daya tampung terbatas sehingga sekolah pun menolak banyak calon pendaftar. Bahkan sekolah juga sudah mampu melakukan seleksi terhadap calon yang akan diterima dengan cara tes atau

termasuk sekolah yang menganut konsep *best input*.

Pada awal berdirinya SMK, bangunan sekolah hanya terdiri dari ruangan kantor dan beberapa ruangan belajar dan teori. Selanjutnya mengalami perkembangan, baik yang berkembang secara perlahan maupun yang berkembang secara cepat. Hal ini karena dukungan dana pendamping dari APBD pemerintah kabupaten ada yang berjalan selama 2 (dua) tahun saja. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah juga melibatkan swadaya dari orang tua siswa dalam membangun gedung dan ruang kelas baru.

Menurut Toyamah dan Usman (2004) salah satu upaya untuk menambah dana operasional sekolah adalah melalui pelibatan orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Jika dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari pemerintah, maka dana dari orang tua memiliki kontribusi yang lebih besar. Padahal sejak krisis ekonomi upaya menarik partisipasi masyarakat masih sulit. Di samping itu menurunnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembiayaan pendidikan disebabkan karena banyaknya subsidi dan bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Program keahlian di SMK ada yang mengalami penambahan dengan membuka jurusan baru. Tentunya jurusan baru disesuaikan dengan kebutuhan pasar seperti dunia industri, swasta, dan juga keinginan masyarakat. Salah satu upaya dalam hal pengembangan SMK adalah melalui pengembangan program keahlian (dulu dikenal dengan istilah jurusan) yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program keahlian inilah yang menjadi ujung tombak menciptakan *link and match* SMK dengan dunia kerja. Inti dari konsep *link and match* yaitu: (a) adanya keterkaitan antara program pendidikan yang diberikan di sekolah dengan kebutuhan masyarakat secara luas, dan (b) adanya kesesuaian atau kecocokan antara program dan produk pendidikan di sekolah dengan kebutuhan masyarakat (Djojonegoro, 1999)

Program keahlian yang ada di SMK tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi daerah dan potensi wilayah dimana SMK tersebut berada. Menurut Sumarsono (2006) salah satu cara yang sering digunakan melihat potensi wilayah adalah melalui struktur PDRB dan lapangan kerja. Struktur PDRB menggambarkan kontribusi setiap sektor atau lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB keseluruhan.

Perubahan struktur ekonomi mengakibatkan terjadinya perubahan struktur penyerapan tenaga kerja (elastisitas penyerapan tenaga kerja). Hal ini seharusnya menjadi dasar acuan pengembangan program keahlian di SMK.

Prestasi sekolah masih dalam taraf tingkat lokal dan regional. Perkembangan sekolah juga dapat dilihat dari prestasi yang dapat diraih sekolah. Sekolah yang memiliki banyak prestasi cenderung akan lebih berkembang dibandingkan dengan sekolah yang kurang memiliki prestasi. Prestasi sekolah inilah yang dapat menjadi dasar untuk menyusun rencana pengembangan sekolah (RPS). Menurut Slamet (2008) penyusunan RPS menerapkan prinsip-prinsip memperbaiki prestasi belajar siswa, membawa perubahan yang lebih baik (peningkatan atau pengembangan), sistematis, terarah, terpadu (saling terkait dan sepadan), menyeluruh, tanggap terhadap perubahan, *demand driven* (berdasarkan kebutuhan), partisipasi, keterwakilan, transparansi, *data driven*, realistik sesuai dengan hasil analisis SWOT, dan mendasarkan pada hasil *review* dan evaluasi

Faktor lain yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur

perkembangan sekolah khususnya SMK adalah hubungan antara SMK dengan pihak eksternal atau pihak swasta. Kemitraan antara sekolah dengan pihak swasta merupakan persyaratan pendirian SMK. Kerja sama dengan pihak eksternal dapat bermanfaat untuk tempat praktek kerja industri (prakerin) atau pun kerja sama dalam penempatan lulusan siswa dan kerja sama produksi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data, dan temuan penelitian, pada kasus SMKN 1 Geger Madiun, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pertimbangan dalam penentuan lokasi dan pendirian SMK adalah (a) ekonomi, (b) pemerataan pendidikan dan pengembangan wilayah, (c) kebutuhan masyarakat terhadap sekolah, (d) komitmen pemerintah kabupaten untuk memberikan dana pendamping, (e) keluaran siswa atau lulusan SMP, dan (f) ketersediaan lahan untuk mendirikan sekolah yang lebih dimungkinkan di wilayah pinggiran. Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian dikategorikan sebagai pertimbangan

kebutuhan sosial karena langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

2. Perkembangan sekolah dengan adanya perencanaan penentuan lokasi dapat dilihat dari (a) perkembangan siswa, dari tahun ke tahun, (b) perkembangan bangunan sekolah, (c) perkembangan program keahlian, (d) prestasi sekolah, dan (e) kerja sama dengan pihak eksternal. Untuk mendukung berkembangnya sekolah harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran dan masukan sebagai berikut.

1. Bagi Sekolah.

Untuk meningkatkan pengembangan sekolah, maka pihak sekolah harus mampu menjalin kemitraan dengan pihak eksternal atau pihak swasta secara lebih baik lagi. Tujuan dari pendidikan SMK adalah menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja, untuk itu kerja sama dengan pihak swasta harus dilakukan lebih maksimal, dan tidak hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan

praktek kerja industri, tetapi merupakan kemitraan untuk peningkatan mutu melalui kerja sama produksi.

2. Bagi Komite Sekolah dan Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus tetap terus ditingkatkan. Berkembangnya sekolah tidak lepas dari dukungan dan komitmen yang baik dari masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Untuk itu peran masyarakat melalui komite sekolah dan partisipasi dalam pembiayaan pendidikan sangat membantu sekolah dalam upaya mengembangkan mutu pendidikannya. Selain itu diharapkan masyarakat dan komite sekolah juga dapat berperan aktif dalam mengawal proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah.

3. Bagi Sub bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten.

Dalam membuat perencanaan pendidikan untuk penentuan lokasi sekolah, hendaknya berdasarkan pada langkah-langkah perencanaan yang baik dan memperhatikan kepentingan publik atau perencanaan atas dasar kebutuhan sosial..

4. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.

Dalam merencanakan penentuan lokasi dan pendirian sekolah kejuruan tidak hanya mengandalkan dana *block grant* dari pemerintah pusat, tetapi juga harus menjalin komitmen bersama dengan pemerintah kabupaten / kota untuk ikut berpartisipasi memberikan kesanggupan menyediakan dana pendamping pendirian sekolah. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun hendaknya mampu menjalin kerja sama yang baik dengan dunia usaha dan dunia industri dalam memanfaatkan dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR).

5. Bagi Pemerintah Kabupaten / kota.

Untuk mempercepat laju perkembangan suatu sekolah dalam mencapai mutu pendidikannya, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten / kota dalam mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana pendamping untuk sekolah baru setidaknya dapat berjalan minimal selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Pembangunan SMK tidak hanya

untuk memenuhi kebijakan dari pemerintah pusat dan untuk pencitraan sebagai kota vokasi, melainkan harus didasari pada pertimbangan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat.

6. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi.

Pengawas SMK di tingkat propinsi harus lebih aktif lagi dalam memantau usulan pendirian SMK dari masing-masing kabupaten / kota, sehingga perencanaannya bisa berjalan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga Dinas Pendidikan Provinsi bisa sebagai mediasi yang baik menghubungkan kepentingan antara dinas pendidikan di kabupaten / kota dengan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMK.

7. Bagi Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam merencanakan lokasi dan pendirian SMK pemerintah harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kebutuhan sosial.

8. Bagi peneliti lanjut.

Untuk dapat menindaklanjuti penelitian yang berkaitan dengan perencanaan lokasi sekolah menggunakan Sistem Informasi Geo-

grafis (SIG), penentuan lokasi yang berdasarkan pada pemetaan wilayah, persebaran sekolah, persebaran peserta didik, aksesibilitas, dan aspek demografi, perlu terdokumentasi dalam *data based* di sistem.

Sekolah Menengah Kejuruan, Balai Pustaka: Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Bintarto, R. 1982. *Metode Analisis Geografi*. Jakarta. LP3ES.

Bogdan, R.C., and Biklen, S.K., 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Needham Heights, MA: Allyn Bacon, Inc.

Daldjoeni, N. 1992. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Penerbit Alumni.

Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Manajemen Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Pedoman Perencanaan Pembangunan USB-SMK*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1976. *Buku Pedoman Pembakuan Bangunan Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pembakuan Sarana Pendidikan.

Djojodipuro, M. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.

Djojonegoro, W. 1999. *Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui*

Guruge. 1972. *Educational Planning*. Bangkok: UNESCO.

Guspika. 2003. Menakar Pentingnya Sebuah Perencanaan. *Simpul Perencana*. 1 (1): 5.

Hallack, J. 1977. *Planning the Location of School: An Instrument of Educational Policy*. Paris: UNESCO.

Lincoln, Y.S., and Guba, E.G.L. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publication, Inc.

Miles, M.B. and Huberman, A. M. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, Inc.

Mulyarto. *Aplikasi SIG Untuk Pemetaan Sekolah (School Mapping)*, (online), (<http://mulyarto.blogspot.com/2008/07/pemanfaatan-teori-lokasi-teori.html>), diakses tanggal 5 Maret 2009.

Rahardjo, M.P., 2003. *Metoda Riset Kualitatif*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Song, S, L. (2007). *Vocational Technical Education and Economic Development- The Singapore Experience*. ITE Paper No 9, 2007.

Yin, R.K. 1984. *Case Study Research Design and Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publication, Inc.